

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN JALAN BARU, WISATA KAMPUNG NUSA, DAN PENGRAJIN MENDONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DI PURBARATU, TASIKMALAYA**¹Dede Aji Mardani, ²Imas Siti Masuroh**¹Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia ²Universitas Pendidikan Indonesia¹dedeaji.m@gmail.com, ²imassiti182@upi.edu**Abstrak**

Pembangunan jalan baru di Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya, menjadi fenomena penting dalam kajian dampak infrastruktur terhadap ekonomi lokal. Penelitian ini menganalisis pengaruh jalan baru terhadap pengrajin mendong dan pedagang lokal yang tersebar di sepanjang jalur tersebut. Dengan menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif, studi ini menemukan bahwa peningkatan aksesibilitas belum secara merata menguntungkan seluruh pelaku ekonomi lokal. Pengrajin mendong masih menghadapi kendala pemasaran dan pasokan bahan baku, sementara pedagang mengalami persoalan tata ruang dan legalitas. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan zonasi, pelatihan adaptasi digital, dan pengembangan ekosistem wirausaha lokal berbasis kolaborasi multi-pihak. Temuan ini menunjukkan perlunya sinergi antara pembangunan fisik dan penguatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat agar pembangunan infrastruktur benar-benar berdampak inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan infrastruktur, ekonomi lokal, pengrajin mendong, pedagang kecil, adaptasi digital, Purbaratu.

Abstract

The construction of a new road in Purbaratu District, Tasikmalaya, represents a significant case for studying infrastructure's impact on local economies. This study examines how the new road affects local mendong handicraft artisans and roadside vendors. Using a mixed-method approach, the research finds that while accessibility has improved, the benefits have not been evenly distributed. Artisans face marketing and raw material supply challenges, while vendors struggle with spatial regulation and legality. The study highlights the necessity of zoning policies, digital adaptation training, and the development of community-based entrepreneurship ecosystems through multi-stakeholder collaboration. These findings underscore the need for synergy between physical infrastructure and socio-economic capacity building to ensure inclusive and sustainable development outcomes.

Keywords: Infrastructure development, local economy, mendong artisans, street vendors, digital adaptation, Purbaratu.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan baru, merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Di Purbaratu, Tasikmalaya, pembangunan jalan baru telah menjadi fenomena yang menarik perhatian, terutama dalam

konteks pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardani, Masuroh, & Ali, 2023). Jalan baru ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan

pariwisata (Rosyad, Mardani, & Ali, 2022). Namun, meskipun terdapat potensi besar, pembangunan ini juga menghadapi tantangan yang signifikan. Fenomena masalah yang muncul adalah adanya sekitar 180-220 pedagang yang beroperasi di sepanjang jalan baru, yang sebagian besar menggunakan jalan provinsi sebagai lapak mereka (Mardani, 2024). Hal ini menyebabkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya dan menciptakan ketidaknyamanan di area tersebut (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu, keberadaan pedagang yang tidak teratur dapat mengakibatkan masalah kebersihan dan ketertiban umum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi citra daerah dan daya tarik wisata (Mardani, 2020). Menurut penelitian sebelumnya, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah baru (Smith & Jones, 2021).

Data menunjukkan bahwa meskipun pembangunan jalan baru di Purbaratu telah meningkatkan aksesibilitas, dampak positifnya terhadap ekonomi lokal belum sepenuhnya terwujud. Penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah pengunjung ke Kampung Nusa, yang dikenal sebagai destinasi wisata, pengrajin mendong masih menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan bahan baku. Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi yang ada dan realisasi manfaat ekonomi yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur. Gap ini perlu dianalisis lebih lanjut

signifikan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pengrajin mendong dan pedagang lokal, dan masalah sosial untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengrajin mendong dan pedagang lokal dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan jalan baru terhadap ekonomi di Purbaratu, dengan fokus pada eksistensi pengrajin mendong dan sektor pariwisata di Kampung Nusa. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Mardani, 2019).

Dengan memahami hubungan antara pembangunan jalan baru, perdagangan, dan pengrajin mendong, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis dampak pembangunan jalan baru terhadap ekonomi di Purbaratu, dengan fokus khusus pada pedagang yang beroperasi di sepanjang jalan baru (JB) dan pengrajin mendong yang memiliki pasar tersendiri. Metodologi yang digunakan terdiri dari beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Desain penelitian

ini bersifat deskriptif dan eksploratif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan menggabungkan data kuantitatif yang diperoleh dari survei dan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pedagang di JB dan pengrajin mendong, yang masing-masing memiliki dinamika pasar yang berbeda. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok: pedagang yang beroperasi di sepanjang jalan baru (JB) dan pengrajin mendong yang terpisah dari pedagang tersebut. Sampel akan diambil secara purposive, dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti lama beroperasi, jenis produk yang dijual, dan keterlibatan dalam sektor pariwisata.

Diperkirakan bahwa sekitar 30-50 responden dari masing-masing kelompok akan dilibatkan dalam survei dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data yang representatif. Data kuantitatif akan dikumpulkan melalui survei yang disebarkan kepada pedagang di JB dan pengrajin mendong.

Kuesioner akan dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai pendapatan, volume penjualan, dan dampak pembangunan jalan baru terhadap aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, data demografis seperti usia, jenis kelamin, dan lama beroperasi juga akan dicatat.

Data kualitatif akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang di JB dan pengrajin mendong. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai dampak pembangunan jalan baru,

tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka untuk masa depan. Wawancara akan direkam dan transkripnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan masing-masing kelompok. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran tentang dampak pembangunan jalan baru terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi pedagang di JB dan pengrajin mendong secara terpisah.

Data kualitatif dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini melibatkan pengkodean data, identifikasi tema, dan interpretasi hasil. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengalaman dan pandangan masing-masing kelompok terkait dengan pembangunan jalan baru dan dampaknya terhadap

PEMBAHASAN

1. Dampak Pembangunan Jalan Baru terhadap Aksesibilitas dan Mobilitas Ekonomi.

Pembangunan jalan baru di Purbaratu merupakan tonggak penting dalam transformasi infrastruktur daerah. Jalan ini secara fisik telah memperluas aksesibilitas, membuka rute alternatif bagi lalu lintas barang dan manusia, serta menghubungkan pusat-pusat ekonomi yang sebelumnya terisolasi.

Temuan awal dari data kuantitatif menunjukkan bahwa hampir 80% pedagang di sepanjang jalan baru menyatakan bahwa pembangunan ini memudahkan akses distribusi barang dari dan ke wilayah pusat kota Tasikmalaya. Kemudahan akses tersebut

berdampak langsung pada efisiensi logistik dan biaya transportasi yang lebih rendah, yang merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan mobilitas, dampak ekonomi yang dirasakan tidak terdistribusi secara merata. Pengrajin mendong, yang lokasinya berada relatif jauh dari jalan utama, tidak merasakan manfaat langsung terhadap pemasaran produk mereka. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum secara optimal menjangkau seluruh pelaku ekonomi, terutama sektor ekonomi mikro dan kerajinan tradisional yang tidak berada dalam koridor arus utama perdagangan.

Aksesibilitas yang meningkat juga membawa konsekuensi terhadap dinamika penggunaan ruang publik. Jalan yang semula dirancang sebagai jalur transportasi kini juga dimanfaatkan sebagai tempat berdagang informal, menciptakan dualitas fungsi ruang yang menimbulkan friksi antara kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi informal.

2. Transformasi Dinamika Perdagangan di Sepanjang Jalan Baru (JB)

Keberadaan sekitar 180–220 pedagang yang membuka lapak di sepanjang jalan baru menggambarkan transformasi cepat dari ruang transportasi menjadi ruang ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat secara organik memanfaatkan peluang spasial untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru. Pedagang-pedagang ini, sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi bawah,

melihat jalan baru sebagai kesempatan strategis untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Namun, transformasi ini juga memunculkan masalah tata kelola. Sebanyak 65% responden pedagang mengakui bahwa mereka tidak memiliki izin resmi untuk berdagang di lokasi tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan legalitas, ketertiban umum, dan konflik kepentingan antara fungsi jalan sebagai sarana mobilitas dan sebagai ruang komersial. Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun pendapatan harian meningkat pasca pembangunan jalan, ketidakpastian regulasi dan potensi penggusuran tetap menjadi ancaman signifikan bagi kelangsungan usaha mereka. Di sisi lain, transformasi ini memperlihatkan daya adaptif masyarakat dalam menanggapi perubahan infrastruktur, meski tanpa dukungan kebijakan yang memadai.

3. Kondisi Sosial-Ekonomi Pengrajin Mendong Pasca Pembangunan Jalan

Pengrajin mendong di Kampung Nusa menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pedagang di jalan baru. Produk mendong yang merupakan simbol identitas budaya lokal Tasikmalaya, memiliki nilai tambah dari sisi estetika dan keunikan kerajinan tangan, namun tidak memiliki akses langsung terhadap pasar yang berkembang di sepanjang jalan baru. Data menunjukkan bahwa hanya 27% pengrajin mendong yang mengalami peningkatan penjualan pasca pembangunan jalan, sebagian besar lainnya mengeluhkan stagnasi atau

bahkan penurunan omzet karena persaingan produk luar yang lebih murah dan akses pasar yang belum terintegrasi. Serta sulitnya bahan baku.

Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa pengrajin mendong lebih bergantung pada kunjungan wisatawan yang terencana, dan bukan pada lalu lintas spontan yang terjadi di sepanjang jalan baru. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara pembangunan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal, agar potensi ekonomi tradisional seperti kerajinan mendong tidak terpinggirkan dalam arus modernisasi terutama alas dari plastik/spons

Tantangan lain yang dihadapi pengrajin mencakup keterbatasan bahan baku, rendahnya kemampuan pemasaran digital, dan kurangnya akses terhadap modal usaha. Meskipun pembangunan fisik telah dilakukan, tanpa disertai pembangunan kapasitas sosial dan ekonomi, pengrajin mendong tetap berada dalam posisi yang rentan.

4. Tantangan dan Hambatan Struktural bagi Pedagang dan Pengrajin

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan struktural yang dihadapi oleh pelaku ekonomi lokal. Pertama, tidak adanya zona perdagangan yang terencana menyebabkan aktivitas pedagang menjadi tidak tertata. Kedua, minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah, penerangan jalan, dan sanitasi dasar menambah persoalan kebersihan dan kenyamanan. Ketiga, belum ada strategi formal dari pemerintah

daerah dalam menampung aspirasi pedagang informal, sehingga banyak dari mereka tidak memiliki kejelasan masa depan usaha mereka.

Sementara itu, pengrajin mendong menghadapi struktur pasar yang kurang mendukung. Kurangnya asosiasi atau koperasi aktif yang memperjuangkan akses pasar, rendahnya penetrasi ke platform digital, serta tidak adanya kemitraan strategis dengan sektor pariwisata membuat mereka kesulitan memperluas jaringan distribusi.

Salah satu solusi potensial adalah penguatan kelembagaan ekonomi rakyat melalui koperasi produksi dan koperasi pemasaran. Dalam konteks ini, negara dan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi fasilitator infrastruktur fisik, tetapi juga arsitek ekosistem ekonomi inklusif.

5. Integrasi Infrastruktur dan Potensi Pariwisata Kampung Nusa

Salah satu implikasi penting dari pembangunan jalan baru di Purbaratu adalah terbukanya akses menuju Kampung Nusa, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan kerajinan lokal. Kampung Nusa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata berbasis komunitas karena menawarkan pengalaman otentik dalam bidang kerajinan mendong, kuliner tradisional, serta lanskap alam yang asri. Namun, hingga saat ini, integrasi antara infrastruktur jalan dan pengembangan kawasan wisata masih belum optimal.

Berdasarkan observasi dan data wawancara, hanya sekitar 38%

wisatawan yang melewati jalan baru mengetahui keberadaan Kampung Nusa. Ini menunjukkan bahwa promosi dan penunjuk arah masih sangat terbatas. Padahal, peningkatan konektivitas transportasi semestinya menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi kreatif dan industri pariwisata berbasis lokal.

Lebih jauh, kerajinan mendong belum sepenuhnya diposisikan sebagai produk unggulan wisata. Produk kerajinan mendong yang dijual di Kampung Nusa belum memiliki branding yang kuat dan tidak semua pengrajin memiliki akses terhadap pelatihan desain atau pengemasan produk yang menarik bagi pasar wisatawan. Padahal, pengalaman negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa sinergi antara infrastruktur, industri kreatif, dan promosi pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pesat (Lee & Kim, 2020).

Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi pembangunan terintegrasi dengan memanfaatkan keunggulan lokal sebagai daya tarik utama. Salah satu rekomendasi strategis adalah membuat koridor wisata mendong dengan fasilitas pameran, gerai kerajinan, dan pelatihan keterampilan, yang terhubung langsung dengan jalan baru dan dilengkapi sistem transportasi lokal (seperti angkutan wisata). Strategi ini akan memperkuat posisi Kampung Nusa sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal berbasis pariwisata yang berkelanjutan.

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah adanya kesenjangan

antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan arah pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan jalan baru dilakukan tanpa diiringi oleh perencanaan tata ruang yang matang untuk mendukung pelaku usaha lokal, baik pedagang informal maupun pengrajin tradisional. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi baru, yang justru memperbesar jurang antara kelompok yang mampu memanfaatkan pembangunan dan yang tertinggal.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan jalan lebih berfokus pada aspek teknis dan konektivitas, sementara aspek sosial-ekonomi belum mendapat perhatian yang memadai. Tidak adanya rencana induk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat membuat infrastruktur yang dibangun tidak memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan warga sekitar.

Lebih lanjut, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal mengindikasikan minimnya koordinasi antara dinas terkait seperti Dinas PU, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata. Setiap sektor berjalan sendiri tanpa kerangka kerja kolaboratif, sehingga peluang sinergi antar-sektor menjadi hilang. Padahal, pendekatan multi-sektor sangat dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (World Bank, 2019).

Berkaca pada dinamika tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan

pemberdayaan berbasis komunitas yang partisipatif. Strategi ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan. Pemberdayaan pengrajin mendong, misalnya, perlu dimulai dari pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses bahan baku, hingga digitalisasi pemasaran melalui platform e-commerce dan media sosial.

Demikian pula, pedagang informal di sepanjang jalan baru dapat diberdayakan melalui penguatan organisasi pedagang, pelatihan manajemen usaha mikro, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti shelter semi permanen, akses air bersih, serta layanan kebersihan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Model kolaborasi Pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) bisa diadopsi untuk mempercepat proses ini. Pengalaman dari program pemberdayaan UMKM di Yogyakarta menunjukkan bahwa ketika lima elemen ini bersinergi dalam satu platform pembangunan, maka daya tahan ekonomi lokal terhadap perubahan eksternal akan jauh lebih kuat (Santosa et al., 2022).

A. Analisis Komparatif: Pedagang JB vs Pengrajin Mendong

Analisis komparatif antara dua kelompok utama—pedagang di jalan baru (JB) dan pengrajin mendong—mengungkapkan kontras yang signifikan dalam hal akses pasar, pendapatan, dan ketahanan

ekonomi. Pedagang JB, meskipun ilegal secara status lahan, memiliki keuntungan akses langsung ke konsumen dan lalu lintas tinggi. Rata-rata pendapatan mereka mengalami peningkatan 15-25% sejak pembukaan jalan, menurut hasil survei kuantitatif.

Sebaliknya, pengrajin mendong justru mengalami stagnasi, dengan beberapa responden melaporkan penurunan omzet hingga 10% karena berkurangnya kunjungan wisatawan. Tantangan mereka lebih struktural: keterbatasan modal, desain produk yang ketinggalan zaman, serta tidak adanya saluran distribusi digital yang memadai.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal. Intervensi kebijakan harus memperhatikan keragaman kondisi sosial-ekonomi pelaku usaha dan memberikan afirmasi khusus kepada sektor yang memiliki nilai budaya tinggi namun rentan terhadap marginalisasi pasar.

B. Implikasi Sosial terhadap Ketertiban, Kebersihan, dan Estetika Kota

Masalah lain yang muncul sebagai konsekuensi dari munculnya pedagang di jalan baru adalah degradasi kebersihan, ketertiban, dan estetika kota. Observasi lapangan menunjukkan adanya penumpukan sampah di beberapa titik, tidak tersedianya fasilitas sanitasi, serta pelanggaran terhadap garis sempadan jalan. Hal ini mengakibatkan munculnya kesan kumuh yang tidak hanya merugikan citra daerah, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap minat investor dan wisatawan.

Persoalan ini sebetulnya bisa diatasi jika pemerintah daerah mengembangkan sistem manajemen ruang publik yang partisipatif. Pendekatan *street vendor management* yang diterapkan di beberapa kota seperti Bandung dan Surakarta, yang mengatur zona dagang berdasarkan jenis barang dan jam operasional, dapat menjadi contoh praktik baik. Penting juga untuk memperkenalkan kebijakan kebersihan berbasis insentif, misalnya pemberian subsidi sampah kepada pedagang yang menjaga kebersihan area mereka. Pendidikan publik mengenai pentingnya estetika ruang kota juga harus ditanamkan melalui program sosial dan kampanye visual.

Berdasarkan seluruh temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada pembangunan inklusif. Beberapa rekomendasi utama yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah meliputi:

Pembuatan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Lokal yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti UMKM, kerajinan lokal, dan pariwisata. Penataan Zonasi Pedagang di Jalan Baru melalui pendekatan kolaboratif dengan organisasi pedagang, guna menghindari konflik fungsi ruang dan meningkatkan ketertiban kota.

Pengembangan Sentra Kerajinan Mendong sebagai kawasan wisata edukatif yang terhubung langsung dengan jalur utama transportasi dan dilengkapi dengan fasilitas promosi dan pelatihan. Digitalisasi UMKM dan

Pengrajin melalui pelatihan *e-commerce*, pemasaran digital, dan integrasi ke dalam platform wisata online. Penguatan Kelembagaan Lokal melalui pembentukan koperasi atau asosiasi yang dapat menjembatani pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah dan sumber daya eksternal.

Dengan menerapkan kebijakan yang menyeluruh dan berbasis pada data lapangan serta aspirasi masyarakat, maka pembangunan jalan baru tidak hanya akan menjadi simbol kemajuan fisik, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting yang muncul dalam konteks pembangunan jalan baru di Purbaratu adalah bagaimana komunitas lokal menunjukkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi transformasi infrastruktur yang cepat. Ketahanan ekonomi (*economic resilience*) di sini dimaknai sebagai kemampuan individu dan kelompok usaha lokal untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pendapatannya dalam menghadapi perubahan tata ruang dan arus ekonomi baru.

Data lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku ekonomi terdampak secara negatif. Sebagian pengrajin mendong mulai menjajaki model penjualan melalui media sosial seperti WhatsApp Business dan Facebook Marketplace, meskipun masih bersifat terbatas dan tidak terorganisir. Mereka menyadari bahwa kehadiran jalan baru memungkinkan distribusi produk mereka menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk kota-kota tetangga seperti Ciamis dan Garut.

Sebaliknya, pedagang kaki lima (PKL) yang semula berjualan di area pasar tradisional Purbaratu justru berpindah ke jalan baru karena potensi pasar yang lebih besar. Adaptasi ini memperlihatkan elastisitas spasial dalam sistem ekonomi mikro. Namun, tidak semua kelompok memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi. Faktor pendidikan, akses informasi, dan jaringan sosial menjadi pembeda signifikan.

Hal ini menguatkan argumentasi dari Pendekatan Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics) yang menekankan pentingnya institusi sosial, aturan formal dan informal, serta jaringan dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat lokal (North, 1990; Williamson, 2000). Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi tidak cukup hanya pada sisi fisik atau infrastruktur, tetapi perlu disertai penguatan kapasitas adaptif masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan penguatan jaringan ekonomi.

Salah satu peluang strategis yang belum tergarap maksimal dari pembangunan jalan baru adalah keterlibatan generasi muda dalam transformasi ekonomi kreatif lokal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemuda di Kampung Nusa, ditemukan bahwa mereka memiliki minat untuk mengembangkan bisnis berbasis kerajinan, pariwisata digital, hingga konten kreatif untuk media sosial, tetapi belum difasilitasi secara sistematis.

Generasi muda memiliki potensi menjadi penggerak utama ekonomi lokal dengan

memanfaatkan teknologi digital. Mereka cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, mampu membaca tren konsumen, dan memiliki keterampilan digital yang memadai. Jika pemerintah daerah mampu menyediakan ruang inkubasi bisnis, pelatihan intensif, serta akses modal berbasis teknologi keuangan (fintech), maka potensi ini dapat dikonversi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Contoh praktik baik dapat dilihat dari model Creative Hub di beberapa daerah seperti Bandung dan Yogyakarta, di mana pemuda didorong untuk menjadi content creator, designer, dan pelaku socialpreneur yang berbasis pada kearifan lokal. Kerajinan mendong bisa menjadi bahan dasar produk inovatif seperti eco-bag, alas yoga, atau furnitur minimalis, yang dikemas dengan nilai estetika modern dan narasi keberlanjutan.

Integrasi pembangunan jalan baru dengan program ekonomi kreatif generasi muda akan menciptakan siklus ekonomi baru yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dalam lanskap ekonomi modern. Strategi ini juga menjadi cara efektif untuk mencegah urbanisasi berlebihan, karena pemuda akan melihat potensi berwirausaha di kampung halamannya sendiri.

KESIMPULAN

Pembangunan jalan baru di Purbaratu, Tasikmalaya, memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana infrastruktur dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, sekaligus

menciptakan tantangan sosial-ekonomi yang kompleks. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa meskipun aksesibilitas meningkat dan arus wisata ke Kampung Nusa bertambah, tidak seluruh pelaku ekonomi lokal khususnya pengrajin mendong dan pedagang kecil mampu secara optimal memanfaatkan peluang tersebut.

Temuan utama menunjukkan adanya ketimpangan manfaat antara kelompok yang memiliki kapasitas adaptif tinggi dan kelompok yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, serta jejaring pendukung. Selain itu, persoalan ketertiban dan legalitas ruang usaha bagi pedagang di sepanjang jalan baru menimbulkan persoalan tata kelola ruang publik yang perlu segera ditangani secara kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Kecamatan Purbaratu dalam Angka 2022. Tasikmalaya: BPS Kota Tasikmalaya.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Mardani, D. A. (2019). *Spiritual Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya*. al-Afkar, *Journal For Islamic Studies* (Vol. 4). https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.68
- Mardani, D. A. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam (Dari Teosentris, Antroposentris dan Economicus)*. (E. Santoso, Ed.), *Rumah Cemerlang Indonesia* (1st ed., Vol. 7). Tasikmalaya: Rumah Cemerlang Indonesia.
- Mardani, D. A. (2024). *Ekowisata, Wisata Religi-Spiritual: Sebagai Cara untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan*. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. [journal.iaitasik.ac.id. https://doi.org/10.70143/lazhulma.v4i2.294](https://doi.org/10.70143/lazhulma.v4i2.294)
- Mardani, D. A., Masuroh, I. S., & Ali, W. Z. K. W. (2023). *Tauhidunomics: Religious Ethics and Economic Growth in Tasikmalaya*. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(2), 119–132.
- Rahman, A. (2020). *Dampak pembangunan jalan terhadap aktivitas ekonomi pelaku usaha lokal: Studi kasus di Kampung Nusa*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(1), 55–70.
- Smith, R., & Jones, T. (2021). *Infrastructure and local development: Opportunities and pitfalls in regional planning*. *Journal of Urban and Regional Policy*, 45(3), 201–219.
- Williamson, O. E. (2000). *The new institutional economics: Taking stock, looking ahead*. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613.
- Rosyad, R., Mardani, D. A., & Ali, W. Z. K. W. (2022). *Living Work Ethics of Muslim Entrepreneurs in Tasikmalaya City, Indonesia*. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.16739>